

POLITIK HUKUM PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGA LOGGING YANG BERKEADILAN

ABSTRAK

Lahirnya UU Cipta Kerja sebagai *Omnibus act* yang merevisi dan mencabut beberapa pasal UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH, telah menimbulkan pertentangan hukum antara UU Cipta Kerja dengan UU dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu melanggar *lex specialis derogat lex generalis*, yang menimbulkan ketidakadilan dalam upaya penegakan hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan filosofi, konsep dan perbandingan hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu akan dijatuhkan pidana penjara dan denda, dengan jangka waktu pidana penjara dan besaran dendanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan. *Kedua*, Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia belum mencerminkan keadilan karena materi muatan yang mengatur berkaitan dengan sanksi tindak pidana *illegal logging* tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat pertentangan berkaitan dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Ketiga*, formulasi sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia yang mewujudkan keadilan yaitu dilakukan dengan dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan penerapan *double track system* dalam penjatuhan sanksi, yaitu tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tetapi juga dapat diikuti dengan penjatuhan pidana tindakan kepada pelaku berupa kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya tindak pidana *illegal logging*, sebagai wujud pemenuhan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam pengaturan sanksi.

Kata kunci : Politik Hukum, Tindak Pidana, Illegal Logging, Keadilan

LEGAL POLITICS OF REGULATING SANCTIONS FOR CRIMINAL ACTS OF FAIR LOGGING

ABSTRACT

*The birth of the Job Creation Law as an Omnibus act which revises and revokes several articles of the Forestry Law, the P3H Law and the PPLH Law, has created a legal conflict between the Job Creation Law and the law in the field of environment and forestry, namely violating the *lex specialist derogat lex generalis*, which gives rise to injustice in efforts law enforcement. This research is a normative juridical research with a statutory regulatory approach supported by philosophical, conceptual and comparative legal approaches. The research results show that first, the regulation of sanctions for illegal logging crimes in Indonesia is based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (Kehutanan), Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), namely that prison sentences and fines will be imposed, with the term of imprisonment and the amount of the fine determined based on the type of illegal logging crime committed. Second, the regulation of sanctions for criminal acts of illegal logging in Indonesia does not yet reflect justice because the material governing the sanctions related to criminal acts of illegal logging still creates legal uncertainty because there are conflicts relating to the regulation of sanctions regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (Kehutanan) Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), with sanctions regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja). Third, the formulation of sanctions for criminal acts of illegal logging in Indonesia that realize justice is carried out based on the values of Pancasila by implementing a double track system in imposing sanctions, namely not only imposing prison sentences and fines but can also be followed by imposing criminal acts on the perpetrators. in the form of an obligation to restore environmental damage resulting from criminal acts of illegal logging, as a form of fulfilling corrective justice and rehabilitative justice in the regulation of sanctions.*

Keywords: *Legal Politics, Crime, Illegal Logging, Justice*